

Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Camat Sei Suka

Haikal Fikri¹, Kamilah, K²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

hfikri741@gmail.com¹, Kamila@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to determine the government's financial accounting system at the Sei Suka sub-district office. This research is a type of descriptive qualitative research. The research subject in this study is the Sei Suka Sub-district Office, and the object of this research is the application of the financial system. Data collection techniques in this study were interviews and observation. The data analysis technique in this research is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study can be explained that the recapitulation of financial statements obtained by the SKPD ceiling is Rp. 3,906,587,366 and the SKPD Ceiling value becomes the value of funds (the balance in the report, it is known that the initial disbursement of funds is Rp. 1,700,496,862 and the institution still has a final balance which is usually called the remaining budget, which is Rp. 2,206,090,504. Cash receipts and disbursements system Cash at the Sei Suka Sub-District Office has not been separated in recording. Transactions that result in cash receipts and disbursements are only recorded in the general treasury book. The implementation of the Government's financial accounting system at the Sei Suka Office is not in accordance with Regulation No. 24 of 2005 and Regulation of the Minister of Home Affairs No. 13 2006.

Keywords : *financial system, local government.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan pemerintah pada kantor camat sei suka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun subjek penelitian pada penelitian ini adalah Kantor Camat Sei Suka, dan objek dalam penelitian ini adalah penerapan sistem keuangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah dapat dipaparkan bahwa rekapitulasi laporan keuangan diperoleh Pagu SKPD sebesar Rp. 3.906.587.366 dan nilai Pagu SKPD menjadi nilai dana saldo pada laporan tersebut, diketahui pencairan dana awal yaitu sebesar Rp. 1.700.496.862 dan lembaga masih memiliki saldo akhir yang biasa disebut sisa anggaran yaitu Rp. 2.206.090.504. Sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Kantor Camat Sei Suka tidak ada pemisahan yang dilakukan dalam pencatatan. Transaksi yang menyebabkan pengeluaran dan penerimaan kas hanya dicatat didalam buku kas umum. Pemerintah pada Kantor Camat Sei Suka belum menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan Peraturan Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Kata kunci : *sistem, keuangan, pemerintah daerah.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang- Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih

luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Anggaran adalah hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam – macam kegiatan terpadu, baik yang menyangkut penerimaan maupun pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu, biasanya adalah dalam tahun. Untuk lebih mengetahui tentang sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan negara, maka mesti diketahui bagaimana sistem administrasi keuangan negara diselenggarakan atau diterapkannya.

Data pembukuan yang diperkenalkan sebagai laporan dapat digunakan sebagai arah independen dan harus ditegakkan oleh otoritas pemerintah lingkungan di bidang administrasi dan tanggung jawab moneter daerah. Laporan keuangan yang berkualitas jelas memerlukan strategi yang baik sesuai dengan pedoman yang berlaku (Defitri, 2018).

Akuntansi Pemerintah (Government Accounting) berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi di lembaga – lembaga pemerintah. Pencatatan itu mencakup administrasi keuangan negara, laporan, dan pengontrolan anggaran. Langkah strategis yang perlu dilakukan saat ini adalah menciptakan pengelolaan pemerintahan yang terbaik. Tata pemerintahan yang baik merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah (Deliza Henny et al., 2021).

Masalah yang kedua adalah pencatatan yang dibuat Pemerintah pada Kantor Kecamatan Sei Suka yang tidak melakukan pemisahan antara jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas, dimana semua transaksi atau kejadian keuangan dibukukan pada buku kas umum yang disediakan. Seharusnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa adanya pemisahan jurnal yaitu 1) Transaksi atau kejadian keuangan yang mengakibatkan penerimaan kas dicatat dalam buku jurnal penerimaan kas. 2) Transaksi atau kejadian keuangan yang mengakibatkan pengeluaran kas dicatat dalam buku jurnal pengeluaran kas, dan 3) Transaksi atau kejadian keuangan yang tidak mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam buku jurnal umum. Akibatnya, sulit untuk mengidentifikasi transaksi mana yang merupakan penerimaan kas dan pengeluaran kas.

KAJIAN TEORI

A. Sistem Akuntansi

Sistem keuangan setiap asosiasi membutuhkan data pembukuan untuk mengatasi masalah administrasi dan navigasi keuangan. Pada prinsipnya sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain, mempunyai fungsi dan tujuan yang sama. Sistem diciptakan untuk menangani sesuatu yang terjadi secara teratur. Suatu Sistem mengolah data (input) menjadi data (output). Masukan dari suatu sistem yaitu bukti transaksi berupa dokumen atau formulir sedangkan keluarannya yaitu laporan keuangan. Sistem akuntansi dapat digambarkan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah pencatatan transaksi keuangan yang sistematis, ringkasannya, dan pelaporan keuangannya. Sistem akuntansi keuangan daerah berfungsi sebagai akuntabilitas, manajerial, hingga pengawasan dalam pelaporan keuangan. Jika laporan keuangan dipertanggungjawabkan dengan baik maka,

kualitas laporan keuangan akan memperoleh karakteristik yang telah ditentukan, karena pada dasarnya sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan (Indrayani & Widiastuti, 2020).

Menurut (Marselina et al., 2021) Sistem akuntansi adalah suatu sistem pencatatan, pengisian formulir, dan pelaporan yang menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sistem informasi akuntansi adalah sumber daya manusia yang berguna untuk mengubah data menjadi informasi, baik yang terkomputerisasi maupun manual. Sistem akuntansi nantinya akan menghasilkan berupa laporan keuangan. Laporan keuangan mempunyai tujuan untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan serta mengevaluasi keberhasilan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan (Ilham et al., 2019).

Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan kepada pihak di luar perusahaan (Tasum SE., M.Si, 2020). Laporan keuangan yang baik dapat dicapai dengan pemanfaatan teknologi untuk membangun sistem informasi dan proses kinerja yang bertujuan agar pemerintah bekerja maksimal sehingga mempermudah akses antar unit kerja. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkualitas, pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah (Astika Rahmawati, 2018). Kinerja keuangan daerah diukur untuk menilai akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan publik (Susanto, 2019).

B. Akuntansi Pemerintahan

Penilaian kinerja pemerintah daerah harus mencakup penilaian kinerja keuangan dan non keuangan (Nugroho, 2018). Kinerja keuangan adalah salah satu aspek yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan keuangan yang baik dan benar (Saraswati & Rioni, 2019). Pelaporan keuangan yang baik harus dibuat dengan berdasarkan prinsip dan aturan standar akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu pada standar keuangan yang telah ditetapkan (Ikriyati & Aprilia, 2019). Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan satu kesatuan dari sistem pengeluaran kas yang bekerja sama yaitu fungsi-fungsi terkait, dokumen dan catatan yang digunakan untuk mengatur kegiatan pengeluaran kas. (Sambuaga et al., 2021). Jika terjaminnya keuangan daerah yang berkualitas maka akan mencapai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Sari & Mustanda, 2019).

Lembaga pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan jasa akuntansi, baik analisis maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan, pendidikan dan pengelolaan keuangan untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan. Akuntansi demikian dikenal dengan akuntansi pemerintah. Untuk dapat memahami pengertian yang lebih jelas mengenai akuntansi pemerintah, disini penulis mengemukakan beberapa definisi dari para ahli. Berdasarkan pengertian diatas akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintah atau lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi.

C. Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintah

Keuangan negara merupakan pondasi vital suatu negara, karena erat kaitannya dengan negara dan bagaimana pengelolaan dana negara dari kas masyarakat menggerakkan roda pemerintahan dan kemajuan. Jika pengelolaan dana negara tidak dilakukan dengan baik, akibatnya tujuan negara tidak tercapai dan individu yang berkembang tidak terjamin. Setiap

pemanfaatan disetujui, diwakili, dan dikelola oleh badan administratif yang dikendalikan oleh peraturan (Sazali, 2020).

D. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006

Model dan komponen yang membentuk sifat ringkasan anggaran yang menyebabkan data dalam laporan fiskal pemerintah memiliki nilai atau keunggulan terdiri dari relevan, solid, serupa, dan wajar (Mahardini & Miranti, 2018), Berikut ini uraian mengenai prosedur penerimaan kas yang tercantum dalam pasal – pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 :

1. Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
2. Penerimaan yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga.
 - b. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga.
 - c. Disetor melalui penerimaan oleh pihak ketiga.
3. Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan diterbitkan dan disahkan oleh PPKD. Prosedur Penerimaan kas yang berikutnya adalah :
 - a. Kepala daerah dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
 - b. Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagian dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 hari kerja terhitung sejak uang kas terima.
 - c. Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
 - d. Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada kepala daerah melalui BUD.
 - e. Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena dengan hasil akhir yang biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas.

Adapun subjek penelitian pada penelitian ini adalah Kantor Camat Sei Suka, dan objek dalam penelitian ini adalah penerapan sistem keuangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Sei Suka adalah Kecamatan yang ada di Kabupaten Batu Bara. Kecamatan Sei Suka merupakan pemekaran dari Kecamatan Air Putih sesuai dengan SK Bupati Asahan No. 138-157/1993 tanggal 1 Mei 1993. Pada saat itu Kecamatan Sei Suka masih merupakan Kecamatan Perwakilan Sei Suka dengan Ibu Kotanya Tanjung Gading kemudian berdasarkan PERDA KAB. ASAHAN Nomor 28 tahun 2000 dan SK Bupati Asahan Nomor 323 tanggal 14 Oktober 2000, Kecamatan Perwakilan Sei Suka di defenitifkan oleh Bupati Asahan menjadi Kecamatan Sei Suka.

Kecamatan Sei Suka terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (Dua Belas) Desa, sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan dalam Daerah Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Sei Suka dimekarkan menjadi 1 (satu) Kelurahan dan 19 (sembilan belas) Desa. dimana masing – masing Kelurahan dan Desa menaungi 7 (tujuh) Lingkungan dan 162 (Seratus Enam Puluh Dua) Dusun. Dan pada Tahun 2019 Kecamatan Sei Suka sah di mekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Sei Suka dan Kecamatan Laut Tador dengan Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara : (6/173/2018), Tanggal 28 Nopember 2018, dimana Kecamatan Sei Suka terdiri dari 1 (Satu) Kelurahan dan 9 (Sembilan) Desa. Kelurahan dan Desanya menaungi 7 (Tujuh) Lingkungan dan 66 (Enam puluh enam) Dusun. Kecamatan Sei Suka berada pada ketinggian 0-18 meter dari permukaan laut dengan Temperatur udara berkisar antara 24°C sampai 33°C.

Jarak pusat pemerintahan kecamatan terjauh \pm 25 Km dengan waktu tempuh \pm 1 jam. Jarak Ibu Kota kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten \pm 24 Km dengan waktu tempuh \pm 45 menit.

Camat merupakan Pemimpin Kecamatan dan sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintah diwilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten atau Kota. Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintah yaitu : a. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum c. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang – undang d. Mengkoordinasikan pemeliharaan Prasarana fasilitas Pelayanan umum.

Pelaporan Arus Kas pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mengelola Keuangan Pemerintah berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Agar semakin jelas, berikut penulis akan menjelaskan contoh pelaksanaan Akuntansi Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Kecamatan Sei Suka.

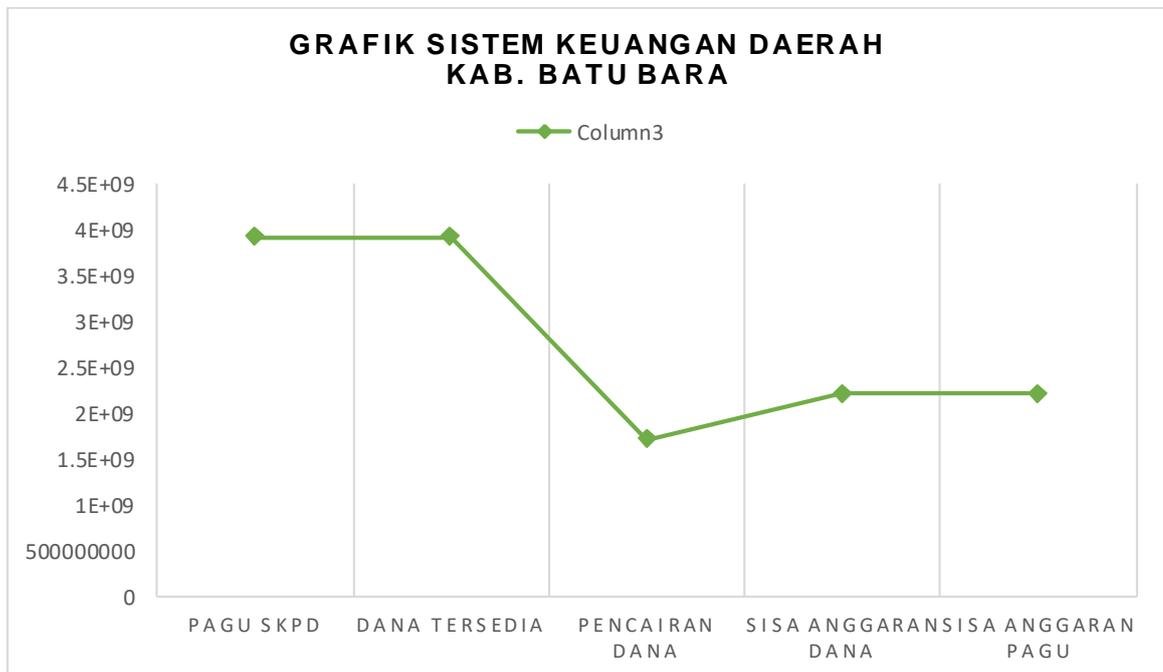
Sedangkan pada Kantor Camat itu sendiri tidak membuat laporan Arus Kas, seharusnya dalam sebuah instansi Pemerintah diharuskan membuat laporan Arus Kas karena laporan Arus Kas termasuk dalam Standar Akuntansi Keuangan. Berikut penulis akan memberikan rekapitulasi laporan keuangan dari kantor Camat Sei Suka sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Laporan Keuangan

Keterangan	Total
Pagu SKPD	Rp. 3.906.587.366
Dana Tersedia	Rp. 3.906.587.366
Pencairan Dana	Rp. 1.700.496.862
Sisa Anggaran Dana	Rp. 2.206.090.504
Sisa Anggaran Pagu	Rp. 2.206.090.504

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dipaparkan bahwa rekapitulasi laporan keuangan diperoleh Pagu SKPD sebesar Rp. 3.906.587.366 dan nilai Pagu SKPD menjadi nilai dana (saldo pada laporan tersebut, diketahui pencairan dana awal yaitu sebesar Rp. 1.700.496.862 dan lembaga masih memiliki saldo akhir yang biasa disebut sisa anggaran yaitu Rp. 2.206.090.504.



KESIMPULAN

Dari uraian yang telah diungkapkan pada bab - bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang sistem akuntansi keuangan Pemerintah pada Kantor Camat Sei Suka

1. Laporan arus kas pada Kantor Camat Sei Suka belum menyajikan Laporan Arus Kas, sedangkan dalam suatu instansi diharuskan menyajikan laporan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah.
2. Sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Kantor Camat Sei Suka belum melakukan pemisahan dalam pencatatan. Transaksi yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas hanya dicatat kedalam buku kas umum.

3. Belum melakukan penyusutan terhadap aktiva tetap.
4. Penerapan sistem akuntansi keuangan Pemerintah pada Kantor sei suka belum sesuai dengan Peraturan Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

DAFTAR PUSTAKA

- Astika Rahmawati. (2018). *PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD KOTA TANGERANG SELATAN*. 20(2005), 8–17.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Deliza Henny, Rebecka, S. D., & Yanti, H. B. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(2), 227–244. <https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9402>
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Ilham, M., Suhendro, D., & Maulana, A. (2019). Aplikasi Sistem Akuntansi Pembelian dan Penjualan barang pada PT. Bonar Jaya Adi Perkasa Nusantara Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Media Sisfo*, 13(2), 106. <https://doi.org/10.33998/mediasisfo.2019.13.2.613>
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah)*. 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/rab.040148>
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan

- Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.500>
- Marselina, E., Hernawati, E., Akuntansi, K., Ganesha, P., Barat, J., & Keuangan, A. (2021). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pencairan Dana Belanja Barang dan Jasa Berbasis WEB di Kecamatan Cangkuang. *JURSIMA (Jurnal Sistem Informasi Dan Manajemen)*, 9(2), 62–71. <https://ejournal.stmikgici.ac.id/index.php/jursima/article/view/270>
- Nugroho, T. R. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>
- Sambuaga, M. M., Pangemanan, S. S., & Walandouw, S. K. (2021). EVALUASI PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO *Jurnal EMBA Vol . 9 No . 4 Oktober 2021 , Hal . 615-621. Jurnal EMBA*, 9(13), 615–621.
- Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 110–120.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Sazali, M. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi APBN 2009-2017). *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 88–107.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Tasum SE., M.Si, T. (2020). Analisa Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (Sak Emkm) Pada Laporan Keuangan Skaters Shop Distro. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7(2), 82–99.

<https://doi.org/10.35137/jabk.v7i2.380>